

## DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Admad Sodik Sudrajat, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII, Nomor. 3, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, 2010.
- Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum, *Tata Cara Pemilihan Lokasi Prioritas Untuk Pengembangan Perumahan Dan Permukiman Di Kawasan Perkotaan*, 2003.
- Badan Standarisasi Nasional, *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*, Bandung, 2003.
- Bappeda Kota Makassar, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2035*, PT. Esa Pratama Cipta Celebes, Makassar, 2013.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Properti*. Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI). Jakarta Pusat. 2016.
- Dinda Kumala dan Setiyono, *Tanah dan Bangunan*, Raih Asah Sukses, Jakarta, 2009.
- FX. Sumarja, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Irwansyah & Ahsan Yunus Penelitian Hukum, Mirra Buana Media, Makasaar 2020, hal. 42.
- Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Cet. 5 Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Peraturan Perundangan Dalam Penyediaan Perumahan*. Bandung. 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, 2020.
- Slamet Muryono dan Westi Utami, *Modul Mata Kuliah Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Program Diploma IV Pertanahan*, Yogyakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Syahrul Ibad, *Manajemen Tata Ruang Kota*, Yayasan Barcode, Makassar, 2020.
- R. Serfianto Dibyo Purnomo dkk. *Kitab Hukum Bisnis Properti*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2011.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Yul Ernis, *Penelitian Hukum Tentang Konsistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai Dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2015.

**Jurnal :**

- Ahmad Tamrin, *Arahan Pemanfaatan Lahan Daerah Aliran Sungai (Das) Jeneberang Terhadap Jarak Sempadan Sungai Di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa*, Jurusan Teknik Perencanaan

Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Nia Kurniati, *Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No. 1, Jurnal UNPAD, 2014.

Offi Jayanti dan Suteki, *Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan Di Garis Sempadan Sungai Babon*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

Putu Aryastana, *Kajian Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Di Tukad Mati, Seminar Nasional Konsepsi #2 (Konsep dan Implementasi 2) Infrastruktur-Bangunan-Konstruksi: Berbasis Lingkungan Kepariwisata Berkearifan Lokal*, Warmadewa University Press, 2016.

R. Muh. Amin Sunarhadi et al, *Penentuan Lebar Sempadan Sebagai Kawasan Lindung Sungai di Kabupaten Sukoharjo*, Prosiding Seminar Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (KPSDA), FKIP Universitas Sebelas Maret, 2015.

Saifullah, *Formulasi Kebijakan Pelaksana Pelindungan Sempadan Sungai Kabupaten Sukamara*, POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik, Vol. 7, No.1, 2016.

Zegovia Parera, Abrar Saleng, *Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan*, Batulis Civil Law Review, Vol. 2, No. 2, 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang "Pendaftaran Tanah".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Apir.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

**Website :**

<https://rakyatsulsel.co/2012/10/31/menelusuri-izin-perumahan-di-pinggiran-sungai-makassar-2/>

<http://liputankalbar.com/pentingnya-tata-ruang-kota-dalam-membangun-dan-menata-sebuah-kota/>

<https://ficrihudh.wordpress.com/2013/03/12/manusia-tanggung-jawab/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan?page=all>